

CASCADING TAHUN 2023

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	Pengendalian Fasilitas penyimpanan bahn berbahaya dan Pengawasan distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota	Pengendalian Fasilitas penyimpanan bahn berbahaya dan Pengawasan distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhaap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Barang beredar dan berbahaya distribusi bahan berbahaya serta tersedianya informasi harga	
					Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat,pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan pasar rakyat,pusat perbelanjaan dan toko	jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan perizinan yang dilaksanakan	
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota	1. Jumlah monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan 2. Jumlah pengawasan ketersediaan stock kebutuhan pokok dan penting lainnya	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	Pelaksanaan metrologi legal berupa,tera,tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Prasarana yang diadakan, Jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang	Pelaksanaan metrologi legal,berupa tera,Tera Ulang	Jumlah Prasarana yang diadakan, Jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Ddalam Negeri	Jumlah Produk IKM yang dipromosikan	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Dekranasda yang Difasilitasi	
							Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah IKM yang difasilitasi desain kemasan produk	

2	Meningkatnya produktivitas sektor Industri	Persentase Peningkatan Asset dan Omset IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop,pendampingan maupun pembinaan lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop,pendampingan maupun pembinaan lainnya	
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah unit pengelolaan penyamakan kulit yang dikelola	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang diterbitkan rekomendasi IUI, izin perluasan Usaha Industri (IPUI),izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis	
3	Meningkatnya Koperasi aktif berpola syariah	Persentase Peningkatan Asset dan Omset Koperasi berpola Syariah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang di lakukan pengawasan	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	Pengawasan kekuatan,keehatan,kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kperassi yang telah dilakukan pengawasan	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berpola syariah	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah hasil RAT yang setuju dengan pola syariah	Pemberdayaan peningkatan produktivitas,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi legalitas koperasi syariah	

			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengawas dan pengurus yang mengikuti pelatihan pembiayaan syariah	Pendidikan an Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yg Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kota Pd.Panjang	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	
4	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase peningkatan aset dan omset umkm	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha menjadi usaha kecil	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibantu modal	
							Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi pendaftaran merk jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikasi halal jumlah wirausahawan yang dibina (coachig clinic, konsultasi bisnis, temu usaha)	
5	Meningkatnya pendapatan Sektor UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Peningkatan Pemahaman an Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Bintek yang dilaksanakan	
5	Penurunan angka kemiskinan sektor UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM	Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase kenaikan Pendapatan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang di berikan bantuan	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah usaha mikro yang di berikan bantuan	
6	Peningkatan indeks kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks kualitas layanan infrastruktur perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1. Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 2. Jumlah unit pasar yang dikelola	Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan	Jumlah jenis sarana dan prasarana pasar (2021) Jumlah THL yang dibayarkan, Jumlah Sarana prasarana pasar yang iseiakan, jumlah unit pasar yang dipelihara (2022)	

					p		Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah unit pasar yang dikelola dan jumlah THL yang dibayarkan (2021) Jumlah THL yang dibayarkan, Jumlah unit pasar yang dikelola (2022)	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Padang Panjang, 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
 Kota Padang Panjang



(JEVIE CARTER EKA PUTRA, ST.MT)
 NIP. 197608302003121002